



IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN MAPPAK KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dorce Dalle¹, Florence D. J. Lengkong², Novva Novita Plangiten³

¹²³ Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2026

Revised Januari, 2026

Accepted Januari, 2026

Available online Januari, 2026

dorce0407@gmail.com,
daicylengkong@unsrat.ac.id,
novvaplangiten@unsrat.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Mappak Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan empat indikator teori Implementasi Kebijakan Edward III. Adapun metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, fokus dalam penelitian ini mengacu pada model Edward III komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana) dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, Penelitian mengenai implementasi pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Mappak menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan belum berjalan optimal dan masih menghadapi berbagai kendala pada setiap indikator teori implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi,

sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi; Pembangunan; Infrastruktur Jalan

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the implementation of road infrastructure development in Mappak District, Tana Toraja Regency, South Sulawesi Province based on the four indicators of Edward III's Policy Implementation Theory: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employs a qualitative descriptive method with data collection techniques consisting of observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of road infrastructure development in Mappak District has not run optimally and still encounters various obstacles in each indicator of Edward III's theory, including communication, resource availability, implementers' disposition, and bureaucratic structure.

Keywords: Implementation; Road Infrastructure; Development

*Corresponding author

E-mail addresses: dorce0407@gmail.com.



1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur jalan secara khusus memiliki peran strategis karena menjadi sarana utama mobilitas penduduk, distribusi hasil produksi, serta akses terhadap pelayanan publik. Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan infrastruktur jalan tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemerataan pembangunan wilayah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan penting dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sebagaimana diamanatkan dalam sistem desentralisasi. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten diberi ruang untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur seringkali tidak berjalan optimal. Berbagai studi menunjukkan bahwa kegagalan pembangunan lebih banyak terjadi pada tahap implementasi dibandingkan pada tahap perumusan kebijakan (Edward III, 1980; Grindle, 1980).

Kabupaten Tana Toraja sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kondisi geografis yang relatif sulit, didominasi oleh wilayah pegunungan dan perdesaan. Kondisi ini menjadikan pembangunan infrastruktur jalan sebagai kebutuhan mendesak dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Salah satu wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur jalan adalah Kecamatan Mappak. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam dan sektor pertanian yang cukup besar, namun belum sepenuhnya didukung oleh akses jalan yang memadai dan berkualitas.

Berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan, pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Mappak masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain keterbatasan kualitas fisik jalan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, serta belum optimalnya manfaat pembangunan bagi masyarakat. Selain itu, terdapat indikasi lemahnya koordinasi antaraktor pelaksana, keterbatasan sumber daya, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pembangunan jalan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek implementasi kebijakan publik.

Dalam perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Sementara itu, Grindle (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh isi kebijakan serta konteks lingkungan tempat kebijakan tersebut dijalankan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan tidak dapat dilepaskan dari kapasitas aktor pelaksana, dukungan kelembagaan, serta kondisi sosial masyarakat setempat.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lemahnya implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah umumnya disebabkan oleh keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Namun, setiap daerah memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda, sehingga diperlukan kajian kontekstual untuk memahami bagaimana kebijakan pembangunan diimplementasikan secara nyata di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada implementasi pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Mappak Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan pembangunan jalan



serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan pembangunan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi pembangunan infrastruktur jalan serta berbagai faktor yang memengaruhinya di tingkat lokal. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali realitas sosial secara komprehensif berdasarkan pengalaman dan pandangan para aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Mappak, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu kecamatan yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur jalan, baik dari segi kualitas maupun aksesibilitas, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks implementasi kebijakan pembangunan daerah.

Informan penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Informan terdiri atas aparat pemerintah kecamatan, aparat desa, pelaksana kegiatan pembangunan, serta masyarakat yang secara langsung merasakan dampak pembangunan jalan. Penentuan informan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat, mendalam, dan mewakili berbagai sudut pandang.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan pembangunan, bentuk koordinasi antaraktor, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur jalan dan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen perencanaan, laporan kegiatan, foto, serta regulasi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal penelitian hingga diperoleh kesimpulan yang menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dalam menganalisis implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Model ini digunakan karena mampu menjelaskan secara sistematis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur, khususnya pada level pemerintahan daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Mappak Kabupaten Tana Toraja



Penelitian ini menganalisis implementasi pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Mappak Kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Edward III, yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan pembangunan jalan telah diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Mappak telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Terdapat berbagai faktor pendukung, namun juga ditemukan sejumlah kendala struktural dan teknis yang memengaruhi capaian pembangunan di lapangan.

Komunikasi dalam Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan

Komunikasi merupakan faktor awal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III (1980) menegaskan bahwa komunikasi yang efektif harus memenuhi unsur kejelasan informasi, konsistensi pesan, serta penyampaian yang tepat kepada seluruh pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pelaksana kegiatan, dan masyarakat di Kecamatan Mappak belum berjalan secara optimal. Pemerintah kecamatan memang telah melakukan sosialisasi terkait rencana pembangunan melalui rapat dan musyawarah desa, namun informasi yang disampaikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat. Akibatnya, masih terdapat warga yang tidak memahami secara rinci tujuan pembangunan, lokasi pekerjaan, maupun dampak yang akan ditimbulkan.

Beberapa informan menyampaikan bahwa masyarakat sering kali baru mengetahui adanya kegiatan pembangunan ketika pekerjaan sudah dimulai. Hal ini menimbulkan resistensi, terutama ketika pembangunan menyentuh lahan milik warga atau mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan masih bersifat satu arah dan belum sepenuhnya partisipatif.

Selain itu, komunikasi antarinstansi juga belum berjalan optimal. Keterlambatan penyampaian informasi dari pemerintah kabupaten kepada pihak kecamatan maupun pelaksana teknis menyebabkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Koordinasi yang kurang intensif ini berdampak pada keterlambatan pelaksanaan dan kurangnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Edward III (1980) yang menyatakan bahwa kegagalan implementasi kebijakan sering kali disebabkan oleh lemahnya komunikasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Tanpa komunikasi yang jelas dan konsisten, pelaksana kebijakan akan mengalami kesulitan dalam memahami tujuan dan prosedur kebijakan secara utuh.

Sumber Daya dalam Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan

Sumber daya merupakan faktor kunci berikutnya dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kemampuan teknis pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Mappak masih menghadapi keterbatasan sumber daya, terutama dari aspek anggaran dan tenaga teknis. Keterbatasan anggaran menyebabkan pembangunan jalan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Beberapa ruas jalan hanya diperbaiki sebagian, sehingga kualitas jalan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah tenaga teknis yang tersedia masih terbatas, baik di tingkat kecamatan maupun pelaksana lapangan. Hal ini berdampak pada pengawasan



pembangunan yang belum optimal. Kurangnya tenaga pengawas menyebabkan kualitas pekerjaan di lapangan tidak selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, keterbatasan peralatan dan sarana pendukung juga menjadi kendala dalam proses pembangunan. Kondisi geografis Kecamatan Mappak yang berbukit dan sulit dijangkau memperparah situasi, karena membutuhkan alat berat dan biaya operasional yang lebih besar.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Grindle (1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun tidak akan dapat dilaksanakan secara optimal.

Disposisi (Sikap Pelaksana) dalam Implementasi Kebijakan

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting yang menentukan komitmen dan keseriusan dalam menjalankan kebijakan. Disposisi mencerminkan tingkat penerimaan, pemahaman, dan kemauan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum aparat pemerintah di Kecamatan Mappak memiliki sikap yang cukup positif terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini terlihat dari adanya upaya untuk tetap melaksanakan pembangunan meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, baik dari segi anggaran maupun kondisi wilayah.

Namun demikian, masih ditemukan beberapa kelemahan, terutama terkait dengan konsistensi pelaksanaan dan tanggung jawab pengawasan. Beberapa informan menyampaikan bahwa terdapat pelaksana yang kurang tegas dalam menindaklanjuti permasalahan di lapangan, sehingga berdampak pada kualitas hasil pembangunan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemauan untuk melaksanakan kebijakan, namun belum sepenuhnya didukung oleh sikap profesional dan komitmen yang kuat. Padahal, menurut Edward III (1980), keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya secara konsisten.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan

Struktur birokrasi merupakan faktor terakhir yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, alur koordinasi, serta prosedur kerja yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Mappak pada dasarnya telah memiliki pembagian tugas yang jelas, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Namun, dalam praktiknya, struktur birokrasi yang panjang justru menjadi salah satu penghambat utama dalam pelaksanaan pembangunan.

Proses koordinasi yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan sering kali menyebabkan keterlambatan pengambilan keputusan. Selain itu, prosedur administrasi yang berbelit-belit membuat pelaksanaan pembangunan tidak berjalan secara efisien. Pengawasan yang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan juga belum berjalan maksimal akibat keterbatasan personel dan lemahnya sistem pengendalian.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Edward III (1980) yang menyatakan bahwa struktur birokrasi yang terlalu kompleks dapat menghambat implementasi kebijakan karena memperpanjang rantai koordinasi dan memperbesar potensi terjadinya distorsi kebijakan.



Sintesis Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Mappak telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Faktor komunikasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, disposisi pelaksana yang belum konsisten, serta struktur birokrasi yang kurang efisien menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan pembangunan.

Temuan ini memperkuat teori Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan yang baik, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan di lapangan. Tanpa komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang mendukung, serta struktur birokrasi yang efisien, kebijakan pembangunan tidak akan memberikan hasil yang optimal.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Mappak memerlukan perbaikan secara menyeluruh, baik dari aspek manajerial, teknis, maupun kelembagaan, agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Mappak Kabupaten Tana Toraja, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan pembangunan. Permasalahan utama terletak pada aspek komunikasi yang belum berjalan secara menyeluruh, keterbatasan sumber daya, komitmen pelaksana yang belum maksimal, serta struktur birokrasi yang masih cenderung panjang dan kurang efisien.

Dari sisi komunikasi, penyampaian informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menimbulkan kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat. Pada aspek sumber daya, keterbatasan anggaran, tenaga teknis, serta sarana pendukung menjadi faktor yang menghambat optimalisasi pembangunan jalan. Sementara itu, disposisi pelaksana menunjukkan adanya kemauan untuk melaksanakan kebijakan, namun belum diikuti dengan konsistensi dan pengawasan yang kuat. Dari sisi struktur birokrasi, mekanisme koordinasi antarinstansi yang belum efektif serta prosedur administrasi yang panjang turut memengaruhi keterlambatan pelaksanaan pembangunan.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasinya. Hal ini sejalan dengan teori Edward III yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat melalui sosialisasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan, memperkuat ketersediaan sumber daya baik dari segi anggaran maupun tenaga teknis, serta meningkatkan komitmen dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Selain itu, penyederhanaan prosedur birokrasi dan penguatan koordinasi antarinstansi perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan yang lebih luas atau menggunakan metode kuantitatif agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan pembangunan di daerah.



5. DAFTAR PUSTAKA

- Alim, I. T. H., Hariyoko, Y., & Puspaningtyas, A. (2022). Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 65-70.
- Buthelezi, S. R., Ojogiwa, O. T., Mubangizi, B. C., & Qwabe, B. R. (2024). Infrastructure development and sustainable rural livelihoods: Perceptions from Umzumbe Local Municipality, South Africa. *Lex Localis: Journal of Local Self-Government*, 22(1).
- Cahyani, L. E., Fatchuriza, M., & Rahmawati, M. P. (2023). Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur Kelurahan Langenharjo di Kabupaten Kendal. *Jurnal Administrasi Publik*, 2, 346-361.
- Gwijangge, D., & Rizal. (2020). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur*. CV Cahaya Arsh Publisher dan Printing.
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2019). Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin menggunakan model Van Meter dan Van Horn. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 1(4), 67-78.
- Mokodongan, C. N., Masinambow, V. A., & Lapian, A. L. C. P. (2023). Analisis penganggaran infrastruktur jalan terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 24(4).
- Mokodompis, L., Lengkong, F. D. J., & Rompas, W. Y. (2018). Implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik di Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(63).
- Nashar, R. (2017). *Perencanaan pembangunan daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Pratama, S. I., Randianto, M., & Aswandi, A. (2023). Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan lingkar pesisir Tanjungpinang. *Student Research Journal*, 1(6), 220-231.
- Pusida, A., Rares, J., & Mambo, R. (2021). Transparansi pengelolaan dana desa oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(108).
- Rahman Bandaso, M. (2022). *Pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap pendapatan masyarakat di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Rahayu, E. E. (2023). Implementasi pembangunan infrastruktur jalan desa sebagai upaya peningkatan aksesibilitas sosial masyarakat di Desa Karangsewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2).
- Sagala, Z. A. (2019). *Pengaruh pembangunan infrastruktur jalan dan sumber daya alam terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara*. Skripsi. Universitas Islam.
- Sasmito, C. (2019). Implementasi pembangunan infrastruktur jalan desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(3).



- Sihombing, A., Sipayung, T., Damanik, S. E., & Nainggolan, P. (2023). Pengaruh pembangunan infrastruktur jalan, pertanian, dan kesehatan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 5(2), 79-89.
- Suaib. (2023). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Jawa Barat: CV Adanu Abimata.
- Sumual, S. R., Tampi, G. B., & Plangiten, N. (2020). Pengaruh komunikasi organisasi terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan di Desa Palamba Kecamatan Langowan Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(93).
- Susanti, I., Aminudin, A., & Suharto, S. (2021). Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan Kota Bengkulu. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 37-46.
- Wido Purnama. (2023). Implementasi AHP untuk sistem pendukung keputusan penentuan usulan prioritas pembangunan infrastruktur daerah.
- Zahra, K., Manalu, R. H. R., Nabillah, R., & Dewi, P. K. (2024). Analisis dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi.